

SENATOR



ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI II /FEBRUARI 2025

KHUSUS

Kebijakan Bahlil
Bikin Heboh

11

VARIA SENAT

Bahas Pengaduan Masyarakat
BAP Panggil Kementerian ESDM

30



JANGAN PANGKAS DANA TKD



Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

NUSANTARA

Senator Al Hidayat Tolak
Kampus Kelola Tambang

15

SETJEN

Adlan Nawawi Jadi Ketua Umum
FOKUS DPD RI 2024-2029

37



Kebijakan Efisiensi dan Tantangan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemotongan anggaran sebesar Rp306 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp51 triliun, menimbulkan berbagai tantangan serius bagi pemerintah daerah di Indonesia. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah efisiensi anggaran untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan mengurangi beban fiskal negara. Namun, pemotongan signifikan ini juga membawa dampak yang luas, terutama pada kapasitas daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

Salah satu dampak utama dari pemotongan anggaran ini adalah penurunan kualitas dan kuantitas layanan publik di daerah. Karena transfer ke daerah merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah, pengurangan ini dapat memperlambat proses pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat, meningkatkan ketimpangan regional, dan menghambat upaya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Sebagai solusi atas tantangan ini, pemerintah pusat perlu merancang mekanisme kompensasi yang efektif untuk pemerintah daerah yang terkena dampak pemotongan anggaran. Salah satu cara adalah melalui alokasi dana khusus yang dapat mendukung proyek-proyek infrastruktur penting atau melalui insentif untuk mendorong investasi swasta di daerah-daerah yang terkena dampak. Pemerintah pusat juga perlu menye-

diakan lebih banyak pelatihan dan sumber daya untuk membantu pemerintah daerah mengelola keuangan mereka secara lebih efisien dan efektif.

Dalam jangka panjang, pemerintah harus mengevaluasi kembali distribusi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mengganggu fungsi vital pemerintahan daerah. Ini termasuk pengkajian ulang formula alokasi TKD untuk memastikan bahwa wilayah dengan kebutuhan lebih besar tidak ditinggalkan. Adaptasi terhadap kebijakan fiskal yang lebih fleksibel dan responsif terhadap keadaan ekonomi dan kebutuhan sosial aktual di masing-masing daerah juga menjadi penting.

Pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang paling mendesak dan cara terbaik untuk membiayainya. Kebijakan ini harus diiringi dengan upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah mereka sendiri melalui perbaikan sistem perpajakan dan peningkatan tata kelola yang baik.

Akhirnya, meskipun tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan efisiensi anggaran ini cukup berat, ini juga memberikan peluang untuk melakukan reformasi yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, transparan, dan partisipatif, efisiensi anggaran bisa dijalankan tanpa mengorbankan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

(* / Mas Aryo Kristiyanto)

SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT: Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **PENANGGUNGJAWAB:** Mahyu Darma
PEMIMPIN REDAKSI: Heru Firdan; **REDAKTUR PELAKSANA:** Budi Fitra Helmi; **REDAKTUR FOTO & GRAFIS:** Agus Wiharto; **EDITOR SENIOR:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **TIM PENULIS ARTIKEL:** Heru Firdan, Budi Fitra Helmi, Intan Fitria Yuliani, Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat 10270. Email : keranjangsenator@gmail.com Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id // website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri



Efficiency Policy and Challenges of Regional Government

Budgetary cut policy which amounts to Rp.306 trillion by President Prabowo Subianto, including transfer budget cut to regions (TKD) which amounts to Rp.51 trillion prompts multiple serious challenge to regional administrations in Indonesia. The policy is deemed as budget efficiency step to allocate resources more effectively and to be less state-fiscal burdening. Nonetheless, the significant cut imposes wide impact likewise, particularly to regional capacity in executing development program and public services.

One of the primary impacts of the cut is the declining quality as well as quantity of public services in the regions. Due to the fact that regional transfers being one of the primary sources of financing of regional administrations, the cut may potentially slow infrastructure development process, educations, health services, and other social services essentially needed by the communities. This can trigger upset among the people, widen regional gaps, and hinder development equality endeavor throughout the country.

As a solution to the challenge, the central government needs to design effective compensation mechanisms to regional administrations directly affected by the budgetary cut. One of the ways is through special fund allocation which is capable of supporting essential infrastructure projects, another is through giving incentives to boost private

investments in affected regions. The central government also needs to provide more trainings and resources to help regional administrations manage their finances more efficiently and effectively.

In the long term, the government has to reevaluate financial distribution between the central government and regional administrations to ensure that the budgetary cut does not disrupt vital functions of regional administrations. It includes reassessing TKD's allocation formula to ensure the inclusion of regions with bigger needs. Adaptation toward a more flexible and responsive fiscal policy to actual economic condition and social needs of each region becomes essential.

Both central and regional administrations have to improve coordination and collaboration to identify the most urgent development priority and the best financing way. The policy must be coupled by endeavors to strengthen regional administration capacity to generate higher income of each own region through rectification of taxation system and improvement of a better management.

Finally, despite the real challenge brought by the budget efficiency policy, it nonetheless presents opportunities to a wider reformation for proper public financial management in Indonesia. With a more structured, transparent, and participative approach, budget efficiency can be implemented not at the expense of regional development and people's prosperity. (***/Mas Aryo Kristiyanto**)

SENATOR 
MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

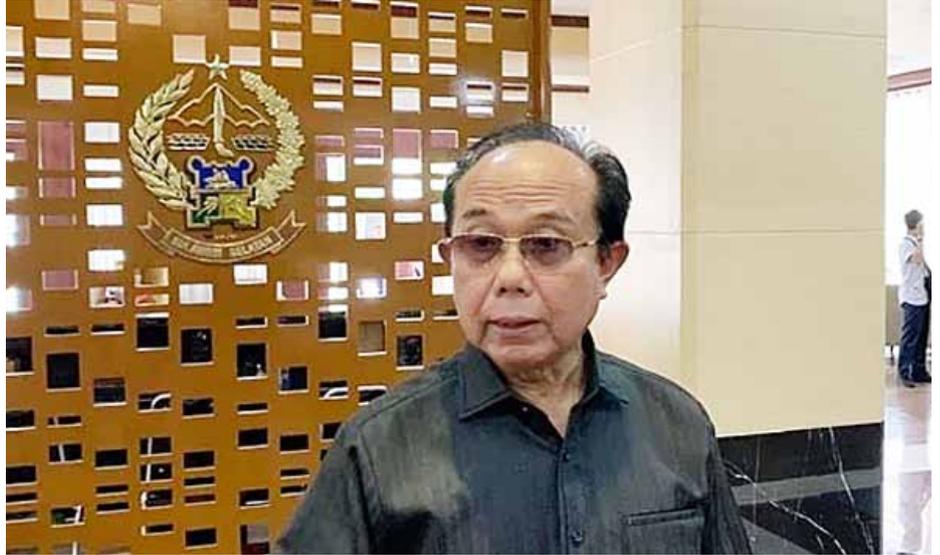
ADVISOR BOARD: Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **NEWS IN CHARGE:** Mahyu Darma **EDITOR-IN-CHIEF:** Heru Firdan; **MANAGING EDITOR:** Budi Fitra Helmi; **PHOTO & GRAPHICS EDITOR:** Agus Wiharto; **SENIOR EDITORS:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **GRAPHIC DESIGNER & PHOTOGRAPHER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **ARTICLE WRITER:** Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah.

EDITORIAL OFFICE News and Media Division, 1st Floor, Building B, DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6, Central Jakarta 10270.
Email: keranjangsenator@gmail.com Suggestions Box: majalah_senator@dpd.go.id // website: www.dpd.go.id // IG: @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri



JANGAN PANGKAS DANA TKD

Presiden Prabowo Subianto membuat kebijakan penghematan anggaran yang dituangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dalam penghematan anggaran tersebut, dilakukan pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.



Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam. (Foto Fajar)

Arso P Nugroho

Penulis

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sofyan Hasdam, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Namun, ia tidak setuju jika penghematan anggaran dilakukan dengan memotong dana transfer ke daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah.

“Dana transfer ke daerah harus diberikan secara utuh sesuai alokasinya. Penghematan bisa dilakukan oleh kepala daerah setempat. Ya, kalau mau penghematan, yang berhemat kepala daerahnya—gubernur, bupati, dan wali kota,” kata senator dari dae-

rah pemilihan Kalimantan Timur itu, Senin (3/2/2025).

Alasannya, menurut Andi Sofyan Hasdam, adalah karena selama ini pemerintah daerah banyak bergantung pada dana transfer pusat untuk membangun wilayahnya. Sehingga, keberadaan dana transfer sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta kepada pemerintah pusat agar tidak memotong dana transfer ke daerah karena hal itu menyangkut kesejahteraan masyarakat di daerah.

Ia sendiri belum mengetahui berapa jumlah dana transfer ke daerah yang dipangkas untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota, baik DAU maupun DBH. Ia menyebut akan memperjuangkan agar DBH

dan DAU tetap menjadi hak daerah dan tidak dipotong. Pemotongan DAU berdampak besar karena dana tersebut digunakan oleh daerah untuk membayar gaji dan berbagai kebutuhan lainnya. Sementara itu, DBH telah diatur oleh undang-undang.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Salah satu langkah efisiensi dalam penggunaan anggaran adalah mengurangi perjalanan dinas hingga 50 persen. Selain itu, pemerintah juga membatasi belanja untuk kegiatan seremonial serta mengurangi belanja yang bersifat mendukung tetapi tidak memiliki *output* yang terukur. (*)

Penghematan Tak Sebanding KEBOCORAN ANGGARAN NEGARA

Arso P Nugroho

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian, menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 37/MK.02/2025. Surat edaran tersebut merupakan turunan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Belanja Kementerian dan Lembaga.

Menurut Penrad, ide pemangkasan anggaran sebenarnya bukan hal baru yang mengejutkan. Publik sudah lama mendorong pemerintah untuk lebih disiplin dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dorongan dan masukan publik ini bukan tanpa dasar, karena dari tahun ke tahun, meskipun rezim berganti, tetap saja terjadi kebocoran anggaran negara, baik dalam bentuk pemborosan maupun korupsi yang mencapai ribuan triliun rupiah. Termasuk kerugian negara akibat pengemplangan pajak yang mencapai ratusan triliun per tahun.

“Kita tentu mendukung semangat dari Presiden Prabowo Subianto dalam merespons keinginan dan harapan masyarakat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kita mendukung semangat

Presiden Prabowo agar pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran melalui penghematan dan pemangkasan anggaran ini,” kata senator dari Sumatera Utara itu, Senin (3/2/2025).

Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun dinilainya tidak seberapa jika dibandingkan dengan potensi pencegahan kebocoran dan korupsi keuangan negara yang seharusnya lebih diprioritaskan. Berdasarkan laporan Indef, angka kebocoran keuangan negara pada tahun 2024 saja mencapai 40 persen, sekitar Rp 1.100 triliun. Belum lagi laporan akhir tahun Kapolri 2024 yang mencatat ratusan kasus korupsi dengan total kerugian negara lebih dari Rp 400 triliun. Catatan Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa kasus korupsi pada tahun 2024 telah menimbulkan kerugian negara sebesar lebih dari Rp 310 triliun.

Namun, Penrad menyayangkan bahwa semangat efisiensi dan ketepatan anggaran ini seharusnya diterapkan secara menyeluruh, bukan sekadar melalui pemangkasan belanja kementerian/lembaga.

Menurutnya, Menteri Keuangan, melalui surat edarannya No-

mor 37/MK.02/2025, kurang cermat dalam menerjemahkan semangat Presiden. Ada yang dipangkas, tetapi ada juga yang tidak. Ia mempertanyakan ketidakadilan dalam kebijakan ini, terutama karena DPD RI mengalami pemangkasan anggaran lebih dari Rp 500 miliar, sementara DPR RI tidak mengalami pemotongan yang signifikan.

“Pemangkasan anggaran ini akan memengaruhi fungsi advokasi dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPD RI. Ruang gerak dan fungsi anggota DPD RI mencakup satu provinsi. Selain itu, isu-isu yang menjadi tanggung jawab seorang anggota DPD RI meliputi seluruh permasalahan di dalam satu provinsi, karena tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota DPD RI tidak terbatas pada pembagian isu-isu komisi sebagaimana anggota DPR RI,” ujarnya. (*)



Anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Daerah Berpeluang Dapatkan Tambahan Dana dari Pusat

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menerjemahkan visi Asta Cita, termasuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kemandirian daerah.

Ia mengakui bahwa dalam kebijakan pemerintah tersebut, dana transfer ke daerah (TKD) ikut dipangkas sebesar Rp 50,59 triliun. Namun, daerah tidak perlu khawatir karena tetap bisa memperoleh tambahan dana jika program kerjanya diselaraskan dengan visi pemerintah pusat. “Daerah tetap bisa memperoleh tambahan dana jika program kerjanya diselaraskan dengan visi pemerintah pusat,” ujar Tamsil saat menyertai kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (10/2/2025).

Tamsil mencontohkan Provinsi Papua Barat Daya. Jika Papua Barat Daya mampu menyusun proposal program yang sesuai dengan prioritas nasional, maka pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung saat menjawab pertanyaan wartawan, di Sorong, Papua Barat Daya. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dapat memperoleh kembali anggaran yang lebih besar untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Selain itu, Tamsil menekankan pentingnya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor-sektor potensial di Papua Barat Daya. Saat ini, menurutnya, kontribusi PNBP dari perikanan dan kehutanan masih jauh dari potensi sebenarnya. Pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada agar PNBP dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

Senator dari Sulawesi Selatan itu mendorong Papua Barat Daya menjadi proyek percontohan dalam optimalisasi PNBP berbasis ekonomi

rendah karbon. Tren pembangunan global saat ini mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan, yang harus diikuti dengan komitmen pembiayaan dari sektor-sektor ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita.

Sebagai langkah konkret, Tamsil mengusulkan penyusunan roadmap optimalisasi PNBP Papua Barat Daya, yang mencakup pemanfaatan sektor perikanan dan kehutanan sebagai sumber utama pendapatan. “Papua Barat Daya adalah masa depan Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah, wilayah ini bisa menjadi pilar ketahanan ekonomi nasional,” kata Tamsil. (*)

Senator Khawatirkan Pusat dan Daerah Tak Solid

Adhi Nugroho

Penulis

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintahan Prabowo Subianto juga berdampak pada daerah. Dalam penerapan efisiensi anggaran tersebut, dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2025 ikut dipangkas. Pemangkasan anggaran TKD sebesar Rp 50,59 triliun dari total TKD tahun 2025 sebesar Rp 919,9 triliun, atau sekitar 5,5 persen.

Menanggapi pemangkasan TKD tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustin Teras Narang, mengkhawatirkan bahwa pemangkasan anggaran TKD dalam efisiensi anggaran ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Apa pun kebijakan yang

dibuat pemerintah pusat pasti akan berdampak pada daerah, apalagi jika menyangkut pemotongan anggaran yang ditransfer dari pusat ke daerah. Sementara itu, soliditas pemerintah pusat belum tentu dirasakan sepenuhnya di daerah,” kata Agustin Teras Narang dalam diskusi daring bertema “Esensi Efisiensi Anggaran”, Sabtu (15/2/2025).

Di daerah, menurut Teras Narang, pengeluaran dan penerimaan negara sering kali tidak seimbang. Selain itu, kebijakan efisiensi ini diterapkan ketika hampir semua daerah masih dipimpin oleh pejabat (Pj) kepala daerah. Artinya, kepala daerah definitif yang baru

nantinya harus mengkaji ulang agar efisiensi benar-benar berjalan dengan baik.

“Kita tahu bahwa kepala daerah baru, hasil pemilihan kepala daerah serentak 2024, baru akan dilantik pada 20 Februari 2025, setelah pemangkasan anggaran dilakukan. Tentu, setelah dilantik, baik gubernur, bupati, maupun wali kota yang definitif akan mengkaji ulang anggaran yang sebelumnya telah disahkan oleh para pejabat kepala daerah,” ujar mantan Gubernur Kalteng itu.

Menurut Teras Narang, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara rakyat menunggu hasil kerja pemerintah yang baru dilantik. “Ini membutuhkan waktu yang panjang, dan yang kami khawatirkan adalah dampaknya di daerah, terutama terkait pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Hal-hal ini harus betul-betul diperhatikan,” pungkas Agustin. (*)



Anggota DPD RI Agustin Teras Narang.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Daerah 3T Perlu Diberi Relaksasi

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, mengungkapkan bahwa dirinya dan sebagian besar anggota DPD RI telah menerima aspirasi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terkait pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Sebagian besar menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap dampak pemotongan anggaran ini terhadap penyelenggaraan pembangunan di daerah, yang pada akhirnya dapat berujung pada tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai warga negara yang wajib dijamin oleh negara,” ungkap Filep, Jumat (14/2/2025).

Dia menegaskan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) berperan sebagai alat strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu kontribusi utama dari penyaluran TKD adalah peningkatan akses layanan publik. Sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam penggunaan TKD.

Sebagai contoh, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik



Anggota DPD RI Filep Mawafma. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

sering digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan, seperti puskesmas dan sekolah di daerah terpencil. Hal ini mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar yang sebelumnya sulit dijangkau. TKD merupakan pilar utama dalam kebijakan fiskal pemerintah untuk mendukung pembangunan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Filep menekankan bahwa pemangkasan TKD tidak hanya sekadar mendorong daerah agar lebih kreatif dalam memanfaatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan melakukan efisiensi. Lebih dari itu, kemampuan setiap daerah dalam menghasilkan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan APBD tidaklah sama. Banyak faktor yang memengaruhinya, termasuk kondisi geografis dan kea-

da-an alam masing-masing daerah.

Pemangkasan TKD juga berdampak signifikan bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Filep mencontohkan Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat, yang berdasarkan Perpres 63/2020 termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Namun, akibat pemangkasan ini, daerah tersebut justru tidak menerima DAK Fisik untuk penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan, keluarga berencana, serta sanitasi layanan dasar.

“Kebijakan ini kontradiktif. Kami mempertanyakan bagaimana pemenuhan hak warga negara atas layanan kesehatan di sana. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat memberikan relaksasi terkait pemangkasan TKD bagi daerah 3T,” pungkask Filep. (*)

Sektor Pendidikan Jangan Jadi Korban Efisiensi Anggaran

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Muhdi, mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menekankan bahwa sektor pendidikan tidak boleh menjadi korban dari kebijakan tersebut. Efisiensi anggaran harus diarahkan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan.

Muhdi mengingatkan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah jangan hanya difokuskan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, dan swasembada energi. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM Indonesia juga harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran.

“Jika efisiensi ini dilakukan, maka harus dialihkan atau dimanfaatkan dengan optimal untuk meningkatkan capaian pembangunan SDM, terutama di sektor pendidikan,” ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI tersebut kepada wartawan belum lama ini.

Anggota DPD RI dari



Anggota DPD RI Muhdi. (Foto Istimewa)

“**Jika efisiensi ini dilakukan, maka harus dialihkan atau dimanfaatkan dengan optimal untuk meningkatkan capaian pembangunan SDM, terutama di sektor pendidikan.**”

Anggota DPD RI,
Muhdi

daerah pemilihan Jawa Tengah itu juga menekankan bahwa efisiensi anggaran perlu dimanfaatkan untuk mengangkat seluruh pegawai honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah—daerah pemilihannya—jumlah tenaga non-ASN mencapai 14.348 orang. Menurutnya, anggaran sebesar Rp306 triliun dinilai cukup untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN PPPK penuh waktu.

“Oleh karena itu, kami mendesak agar efisiensi anggaran benar-benar digunakan untuk mengoptimalkan pengangkatan seluruh pegawai non-ASN menjadi ASN PPPK penuh waktu, sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, khususnya bagi guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan,” tandas Ketua PGRI Jawa Tengah tersebut. (*)



Wawancara Ketua DPD RI Sultan B Najamudin:

Kebijakan Efisiensi Jangan Ganggu Pelayanan Publik

Theresia Oktavina

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin meng-apresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran belanja dalam sistem pemerintahan. Namun yang penting, efisiensi jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Berikut petikan tanya jawabnya.

Bagaimana tanggapan Anda terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan efisiensi anggaran belanja dalam sistem pemerintahan?

Saya sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran. Menurut saya, efisiensi yang tepat bisa menciptakan cukup anggaran untuk dialokasikan pada program-program prioritas. Ini adalah langkah yang penting, mengingat efisiensi adalah budaya yang harus dimulai dalam pemerintahan untuk mencegah adanya kebocoran anggaran, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Apakah Anda melihat langkah efisiensi anggaran ini sebagai sesuatu yang bisa berdampak langsung terhadap program-program strategis pemerintah?

Tentu, efisiensi anggaran ini sangat menentukan sejauh mana anggaran dapat dipakai secara efektif untuk mewujudkan program-program strategis yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah program “Makan Bergizi Gratis”. Penghematan

anggaran akan menentukan kualitas penyelenggaraan program-program tersebut, yang sangat vital untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam praktiknya, kebijakan efisiensi anggaran ini bisa menimbulkan tantangan. Apa harapan Anda terkait implementasinya di lapangan?

Harapan saya, kebijakan efisiensi ini tidak mengganggu performa birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Efisiensi yang tepat harus disertai dengan pendekatan inovasi. Jangan sampai, justru karena efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik menjadi terganggu atau malah merugikan masyarakat. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah bisa melakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan yang sangat dibutuhkan rakyat.

Apa pesan Anda kepada kementerian dan lembaga terkait kebijakan efisiensi anggaran ini?

Saya berharap semua kementerian dan lembaga dapat menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran yang digagas oleh Presiden Prabowo. Efisiensi ini harus diikuti dengan tindakan yang konkret untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tetap tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas. Jangan ada kompromi dalam memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa. (*)



Kebijakan Bahlil Bikin Heboh

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengeluarkan kebijakan kontroversial terkait pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi atau gas melon melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023.

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Kebijakan yang diterbitkan tanggal 1 Februari 2025 ini menyatakan bahwa hanya sub pangkalan resmi dengan nomor induk berusaha (NIB) yang diizinkan untuk menjual gas melon, sehingga warung-warung kecil yang biasa menjualnya tidak dapat lagi menyediakannya. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan gas tersebut dan harus antri di jumlah agen yang sangat terbatas.

Kebijakan ini langsung mendapat sorotan tajam dari publik serta media massa dan sosial yang menayangkan antrean panjang masyarakat yang berusaha mendapatkan gas bersubsidi ini. Bahkan, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga turut menyuarakan dan mengkritik kebijakan tersebut karena dampaknya yang langsung



Anggota DPD RI Abdul Hamid. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

terasa di masyarakat.

Namun, kebijakan ini tidak berlangsung lama. Hanya tiga hari setelah diberlakukan, Presiden Prabowo Subianto langsung mengintervensi dengan memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut kebijakan tersebut. Instruksi ini diberikan setelah melihat kondisi di lapangan yang menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar memasak.

Menanggapi instruksi dari Presiden Prabowo, Anggota Komite II DPD RI yang membidangi energi, Abdul Hamid, menyatakan rasa leganya. Pada tanggal 4 Februari 2025, dia mengatakan, “Kita sangat mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto, karena LPG 3 kg ini meru-

upakan kebutuhan utama masyarakat. Tanpa gas mereka tidak bisa memasak.”

Dengan perubahan kebijakan ini, warung-warung kecil kembali diizinkan untuk menjual gas melon secara eceran. Hal ini sangat disambut baik oleh masyarakat, khususnya di daerah kepulauan dan terpencil, yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses ke pangkalan gas resmi.

Kebijakan ini kini menjadi contoh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah yang membutuhkan respons cepat dan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Ini juga menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang tanggap terhadap umpan balik masyarakat dalam mengelola isu-isu publik yang sensitif. (*)

Kebijakan yang Tepat Pengecer Jual Gas Melon

Arso Pranoto Nugroho

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Fahira Idris, menyambut baik instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengizinkan kembali warung-warung pengecer menjual LPG 3 kg atau gas melon. Menurutnya, keputusan ini sangat tepat dan mendukung kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Fahira menekankan dua aspek penting dalam penataan distribusi penjualan LPG 3 kg: prakondisi dan timing. “Prakondisi adalah memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satu yang utama adalah memastikan sebagian besar warung atau pengecer gas elpiji 3 kg di seluruh Indonesia sudah menjadi sub pangkalan dengan proses administrasi dan persyaratan yang paling mudah dan ringan,” ujar Fahira, dalam siaran persnya pada Sabtu (8/2/2025).

Selama proses transisi tersebut, Fahira menjelaskan bahwa pengecer tetap dapat melakukan pembelian di pangkalan dan memasarkan



Anggota DPD RI Fahira Idris. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Prakondisi adalah memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satu yang utama adalah memastikan sebagian besar warung atau pengecer gas elpiji 3 kg di seluruh Indonesia sudah menjadi sub pangkalan dengan proses administrasi dan persyaratan yang paling mudah dan ringan.**”

Anggota DPD RI,
Fahira Idris

seperti biasa, sehingga aktivitas masyarakat membeli gas melon tidak terganggu. Menurutnya, skema pengecer menjadi sub pangkalan harus segera dirumuskan dan diim-

plementasikan.

Mengenai timing, Fahira berpendapat bahwa kebijakan ini sebaiknya diimplementasikan setelah masa transisi selesai, yaitu ketika pengecer gas LPG 3 kg di berbagai wilayah Indonesia sudah menjadi sub pangkalan yang persentasenya sudah mendekati 100 persen. “Masyarakat sudah bisa membelinya di warung atau pengecer yang sudah menjadi tempat langganannya selama ini,” kata Fahira.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa idealnya kebijakan ini diterapkan setelah Idulfitri agar masyarakat bisa lebih tenang. Fahira juga mengharapkan agar Pertamina dan Kementerian ESDM bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperluas jaringan distribusi hingga ke pelosok desa. (*)

Evaluasi Menyeluruh Distribusi Gas Melon



Anggota DPD RI Eva Susanti. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Arso Pranoto Nugroho

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Sumatera Selatan, Eva Susanti, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina terhadap sistem distribusi dan pemasaran LPG 3 kg bersubsidi, yang lebih dikenal sebagai gas melon. Menurut Eva, kebijakan yang tidak efektif dapat merugikan masyarakat kelas bawah yang sangat bergantung pada sumber energi ini.

“LPG 3 kg ini merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan. Kebijakan harus benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Jika ada penyimpangan

“**Kita menginginkan kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil. Pemerintah harus memastikan bahwa pendistribusian LPG 3 kg tidak mengalami kendala dan tidak ada penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.**”

Anggota DPD RI,
Eva Susanti

dalam distribusi atau terjadi penimbunan, pemerintah harus bertindak tegas. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari kesulitan rakyat,” ujar Eva dengan tegas, pada hari Selasa (4/2/2025).

Eva menilai bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu Tepat Sasaran, telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “Kami banyak menerima laporan dari masyarakat tentang kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Ini adalah persoalan serius karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Jangan sampai karena kebijakan pemerintah, rakyat yang menjadi korban,” tambahnya.

Beruntung, Presiden telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi potensi kelangkaan gas tersebut, seperti yang disampaikan oleh Eva. Dia juga mendorong pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan pendataan penerima subsidi, sehingga LPG 3 kg benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. “Kita menginginkan kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil. Pemerintah harus memastikan bahwa pendistribusian LPG 3 kg tidak mengalami kendala dan tidak ada penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” ucap Eva.

Dia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar pasokan gas subsidi tetap stabil dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. (*)

Pemerintah Perlu Perbaiki Tata Kelola Gas LPG 3 Kg

Theresia Oktavina

Penulis

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Erni Daryanti, menekankan pentingnya perbaikan tata kelola distribusi LPG 3 kg atau gas melon sebagai bahan bakar gas bersubsidi. Menurut Erni, perbaikan ini mutlak diperlukan untuk memastikan distribusi gas yang tepat sasaran dan menjaga ketersediaannya bagi masyarakat.

Erni menjelaskan bahwa pemerintah selama ini menghadapi kesulitan dalam mengawasi penjualan gas melon dari pengecer ke pengguna akhir. “Penjualan dari Pertamina ke agen dan pangkalan sudah termonitor dengan baik. Namun, pengawasan penjualan dari pengecer ke pengguna sangat sulit terutama dalam hal pengguna dan harganya,” ujar senator dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah itu pada Selasa (4/2/2025).

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2008, harga jual eceran LPG 3 kg dari Pertamina ke agen atau pangkalan adalah sebesar Rp12.750. Namun, Erni menyebutkan bahwa faktanya di lapangan, harga jual LPG 3 kg di masyarakat sudah mencapai di atas Rp20.000,



Anggota DPD RI Erni Daryanti. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Penjualan dari Pertamina ke agen dan pangkalan sudah termonitor dengan baik. Namun, pengawasan penjualan dari pengecer ke pengguna sangat sulit terutama dalam hal pengguna dan harganya.”

Wakil Ketua
Komite III DPD RI,
Erni Daryanti

bahkan ada yang lebih dari Rp25.000. “Pengguna LPG 3 kg seharusnya adalah kalangan masyarakat miskin, pedagang usaha mikro dan kecil, nelayan, dan petani,” katanya.

Erni meminta pemerintah

untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengguna dan harga LPG 3 kg di masyarakat, dengan menyesuaikan harga jual eceran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di kisaran Rp15.000-16.000. “Monitoring ini penting untuk memastikan distribusinya tepat sasaran dan tidak membebani anggaran,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Erni juga menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan tidak adanya penyelewengan penggunaan gas bersubsidi ini, seperti penimbunan yang dapat mengakibatkan kelangkaan dan tingginya harga gas elpiji di masyarakat, serta penyelewengan dalam bentuk pengoplosan dari tabung 3 kg yang bersubsidi ke tabung 12 kg yang tidak bersubsidi. (*)

Senator Al Hidayat Tolak Kampus Kelola Tambang

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Al Hidayat Samsu, menolak keras pemberian kewenangan pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya merusak integritas akademik tetapi juga berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang lebih besar.

“Kebijakan pemberian izin pengelolaan pertambangan ini kepada perguruan tinggi bukan hanya tidak masuk akal, tetapi merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab yang akan semakin membebani dunia akademik. Padahal, permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi sudah cukup banyak,” ungkap senator dari Sulawesi Selatan tersebut pada Jumat (31/1/2025).

Senator tersebut menambahkan bahwa perguruan tinggi telah dihadapkan pada banyak masalah seperti pencairan tunjangan kinerja dosen yang tertunda bertahun-tahun, kesejahteraan dosen yang memprihatinkan, hingga beban administratif yang terus meningkat. “Jadi, jangan ditambah lagi dengan beban pengelolaan tambang. Pemerintah seharusnya fokus



Anggota DPD RI Al Hidayat Samsu. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

pada perbaikan sistem pendidikan tinggi, mengurangi beban administrasi dosen, serta meningkatkan kesejahteraan mereka agar pendidikan tinggi di Indonesia semakin berkualitas,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kebijakan yang lebih adil yang seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah adalah menciptakan ekosistem akademik yang kondusif bagi perguruan tinggi. Hal ini mencakup pencairan tunjangan kinerja dosen yang tertunda, peningkatan gaji, dan pengurangan beban administratif yang berlebihan.

Sebagai alternatif, pemerintah dapat mewajibkan perusahaan tambang untuk menyediakan beasiswa bagi

siswa dari daerah sekitar tambang agar mereka dapat menempuh pendidikan di perguruan terbaik di Indonesia dan diberi kesempatan bekerja di kampung halaman mereka. “Kebijakan afirmatif ini lebih berkeadilan dibandingkan menyerahkan tambang kepada perguruan tinggi,” tegasnya.

Al Hidayat Samsu juga menekankan bahwa perguruan tinggi harus tetap memegang peran utama sebagai pengawas kebijakan publik dan penjaga independensi akademik. Memberikan kewenangan mengelola tambang kepada mereka justru berpotensi membungkam suara kritis akademisi terhadap eksploitasi sumber daya alam yang merugikan lingkungan dan masyarakat lokal. (*)

Senator Happy Djarot Ikuti Tanam Serentak di Jakarta

Theresia Oktavina

Penulis

Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Jakarta, Happy Djarot, berpartisipasi dalam kegiatan tanam serentak se-DK Jakarta untuk mendukung program swasembada dan ketahanan pangan, di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (22/1/2025).

Happy Djarot bersama dengan pejabat Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta dan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta menanam benih jagung dan cabai serta memetik hasil panen terong di lahan seluas kurang lebih 1000 meter persegi di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kecamatan Kembangan itu.

Menurut Happy Djarot, kegiatan yang dilakukannya itu diharapkan bisa menjadi landasan untuk modal pembangunan dan kesejahteraan, disamping kebutuhan pokok bagi manusia dalam membentuk ketahanan dan swasembada pangan. “Menurutnya, pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tanpa pangan yang cukup, tidak akan ada tenaga untuk bekerja, belajar, atau beraktivitas. Oleh



Anggota DPD RI Happy Djarot saat mengikuti tanam serentak di Jakarta. (Foto Istimewa)

“Menurutnya, pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tanpa pangan yang cukup, tidak akan ada tenaga untuk bekerja, belajar, atau beraktivitas. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi landasan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.”

Anggota Komite II
DPD RI,
Happy Djarot

karena itu, ketahanan pangan menjadi landasan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat,” kata Happy Djarot.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi dialog interaktif bersama 3.000 peserta. Mereka

terdiri dari kelompok tani juga masyarakat umum yang dilakukan secara *online* dan *offline*. Para peserta yang terdiri dari kelompok tani menyambut antusias program Tanam Serentak se-DK Jakarta.

Dalam program tersebut, masing-masing wilayah dengan bangga memamerkan hasil tani dan perkebunan (*urban farming*) mereka, seperti labu madu, cabai, dan jagung dari Jakarta Barat; anggur, rosella dari Jakarta Pusat; serta jagung pulut dari Jakarta Utara.

Happy Djarot mengharapkan hasil panen dari kerja keras dan ketekunan kelompok tani dan Tim Penggerak PKK yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk warga sekitar dan juga penunjang perekonomian kerakyatan. “Program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal,” ujar Happy Djarot. (*)

Keistimewaan Budaya Yogyakarta Perlu Diajarkan di Bangku Sekolah

Adhi Nugroho

Penulis

Isu kesehatan mental remaja pada tahun 2025 diprediksi akan tetap menjadi isu yang perlu mendapat perhatian khusus. Berbagai survei dan penelitian menunjukkan masih tingginya tingkat masalah kesehatan mental pada berbagai rentang usia remaja di Indonesia. Berbagai faktor seperti keluarga dan lingkungan menjadi latar belakangnya.

Untuk mengatasi masalah kesehatan mental remaja, diperlukan upaya dan program pengendalian laju prevalensi seperti meruntuhkan stigma, menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan edukasi tentang bagaimana cara mencari pertolongan profesional dan memberikan dukungan dan penanganan yang tepat di lingkungan.

Keistimewaan budaya Yogyakarta merupakan bagian integral dari identitas budaya dan sistem pemerintahan di Indonesia. Keistimewaan budaya ini menjadi nilai penting pada lingkungan remaja dan sebagian besar dapat ditanamkan pada koridor pendidikan. Budaya menjadi sarana memelihara dan mengembangkan nilai-nilai sosial yang berlandaskan pada tatanan interaksi dan tradisi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).



Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas bersama anggota DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno dan R.A. Yasinta Sekarwangi Mega dalam FGD bertema "Realisasi Pendidikan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta". (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

"Internalisasi nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta di sekolah diharapkan mampu mengajarkan budaya Yogyakarta. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan bisa menjadikan ini sebagai bagian dari kurikulum untuk membentuk peserta didik. Saya ingin anak-anak kita memiliki kesadaran budaya dan karakter yang kuat, serta memahami nilai-nilai moral, sosial, dan etika yang menjadi ciri khas masyarakat Yogyakarta," kata Wakil Ketua DPD RI GKR Ratu Hemas dalam focus group discussion (FGD) bertema "Realisasi Pendidikan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta", Kantor DPD RI DIY, Jumat (24/1/2025).

GKR Hemas menekankan, Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pelajar, memiliki berbagai keistimewaan yang menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab

untuk dijaga dan diperjuangkan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY memberikan otonomi khusus dalam tata kelola pemerintahan dan pelestarian budaya, penting untuk memastikan implementasi undang-undang ini tetap berjalan dengan baik.

FGD menghasilkan beberapa poin penting, salah satunya rekomendasi DPD RI DIY untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi seluruh *stakeholder*, baik perguruan tinggi, karang taruna, maupun keluarga melalui PKK untuk menyusun modul dan kurikulum keistimewaan. Diperlukan juga digitalisasi materi kurikulum maupun modul untuk disebarluaskan ke generasi muda. Materi ini di dalamnya memuat sejarah, latar belakang, dan pelaksanaan implementasi Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta dalam kehidupan sehari-hari. (*)

Senator Lia Apresiasi SE 3 Menteri, Pembelajaran di Bulan Ramadan

Rini Sumarni

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Lia Istifhama, menyambut positif keputusan pemerintah dalam menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur perihal pembelajaran selama bulan Ramadan 2025.

Surat edaran (SE) tiga menteri tersebut mengatur waktu pembelajaran mandiri di rumah serta pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan. Dalam keputusan tersebut, selama Ramadan, masih ada kegiatan belajar mengajar di sekolah yang dimulai pada tanggal 6 hingga 25 Maret 2025. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.

Sementara itu, pada tanggal 27 dan 28 Februari serta 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat, sesuai penugasan dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan. Selain mengatur waktu, SE bersama itu juga



Anggota DPD RI Lia Istifhama. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

memberikan arahan bagi pemerintah daerah, Kepala Kantor Wilayah Kemenag, dan orang tua.

“Artinya, pada seminggu awal puasa, anak-anak belajar di rumah. Dua minggu pembelajaran di sekolah. Kemudian, anak-anak libur Lebaran. Saya menilai langkah ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pendidikan meskipun dalam konteks bulan suci Ramadan,” kata Ning Lia, senator asal Jawa Timur ini, Rabu (22/1/2025).

Dia menegaskan, Ramadan bukan alasan untuk berhenti belajar. Ramadan justru menjadi momentum pembelajaran, karena dunia pendidikan adalah proses berkelanjutan. Anak-anak bisa

memanfaatkan waktu belajar dan berkumpul menikmati momentum berpuasa bersama keluarga. Karena itu, dia mengimbau agar orang tua dapat membimbing dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah serta memantau mereka saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.

“Selama pembelajaran, baik di rumah maupun di sekolah, saya berharap peserta didik bisa melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan taqwa, akhlak mulia, kepemimpinan, serta kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama. Salah satunya seperti pesantren kilat, tadarus bersama, dan ceramah,” kata Ning Lia. (*)

Penataan Lembaga DPD RI Harus Segera Dilakukan



Pimpinan dan anggota PPUU DPD RI, usai menggelar rapat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Agustin Teras Narang menegaskan bahwa penataan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus segera dilakukan. Penataan itu melalui produk undang-undang sendiri, sesuai amanah konstitusi yang selama ini kurang mendapat perhatian publik.

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

“**P**enataan ini penting agar DPD RI bisa lebih optimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah,” tegas anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah itu, dalam rapat Panitia Per-

ancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Rabu (5/1/2024).

Dalam rapat tersebut, mantan Gubernur Kalimantan Tengah itu menyampaikan tiga catatan utama terkait penataan DPD RI. Pertama, dari aspek historis, ia menekankan bahwa DPD RI lahir sebagai bagian dari reformasi. Oleh sebab itu, semua pihak harus memahami latar belakang pembentukannya agar peran lembaga ini tetap sesuai dengan tujuan awalnya.

Kedua, dari sisi sosiologis, kebutuhan rakyat terhadap DPD RI harus diangkat lebih jelas. Menurutnya, publik perlu memahami bahwa penataan ini bukan sekadar amanah konstitusi, tetapi juga demi memperkuat pem-

angunan daerah.

Ketiga, dari perspektif yuridis, Teras menilai seluruh regulasi terkait peran DPD RI, mulai dari UUD NRI 1945 hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK), harus dikaji lebih dalam. Langkah ini penting agar reformasi kelembagaan bisa berjalan sesuai koridor hukum dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Teras berharap, dengan penataan berbasis historis, sosiologis, dan yuridis, DPD RI bisa semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah. “Rakyat di daerah dan para pemangku kepentingan harus ikut mendorong agar DPD RI bisa lebih strategis dalam membangun daerah,” tegasnya. (*)

Irman Gusman Dukung Pembangunan PLTS Singkarak

Didin Saputra

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak, Sumatera Barat. Menurut Irman, pembangunan ini tidak hanya akan memberikan manfaat positif bagi Indonesia, khususnya masyarakat Ranah Minang, tetapi juga sebagai solusi global dalam menghadapi krisis iklim.

“Saat ini ada tiga tantangan dunia, salah satunya terkait dengan krisis iklim. Pembangunan PLTS terapung ini merupakan sebuah solusi menjawab tantangan perubahan iklim. Dunia sedang menghadapi perubahan iklim sehingga inovasi seperti PLTS terapung ini sangat dibutuhkan,” ujar Irman Gusman pada Kamis (30/1/2025).

Mengenai penolakan dari masyarakat setempat terhadap pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak, Irman menyarankan agar pemerintah daerah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Dia menekankan pentingnya



Anggota DPD RI Irman Gusman. (Foto Istimewa)

“**Pada prinsipnya, saya mendukung pembangunan PLTS terapung Singkarak tersebut. Jadi, saya hanya mengimbuu dan menyarankan agar masyarakat setempat dan pemerintah daerah mendukung setiap investasi yang mengarah pada energi terbarukan seperti pembangunan PLTS Terapung Danau Singkarak ini.**

**Anggota DPD RI,
Irman Gusman**

dialog bersama masyarakat, mengingat pentingnya energi terbarukan.

Irman juga meminta

PT PLN Indonesia Power, sebagai pihak yang akan membangun PLTS, untuk menyosialisasikan dan menjelaskan secara detail manfaat PLTS bagi lingkungan agar masyarakat dapat memahaminya lebih baik. Selain itu, Irman menekankan pentingnya memenuhi janji-janji dari kesepakatan pembangunan PLTS Singkarak yang belum terealisasi.

“Pada prinsipnya, saya mendukung pembangunan PLTS terapung Singkarak tersebut. Jadi, saya hanya mengimbuu dan menyarankan agar masyarakat setempat dan pemerintah daerah mendukung setiap investasi yang mengarah pada energi terbarukan seperti pembangunan PLTS terapung Danau Singkarak ini,” tutur Irman Gusman. (*)

Sidang Paripurna DPD RI Untuk Perjuangkan Aspirasi Daerah

Betria Eriani

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Agustin Teras Narang, menekankan pentingnya sidang paripurna yang lebih substansial dan tidak hanya bersifat seremonial. Ia mendorong agar forum tersebut menjadi wadah utama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah secara efektif dan efisien.

“Menata ulang aspek seremonial agar lebih esensial adalah salah satu agenda kami di DPD RI saat ini. Kami ingin lembaga ini lebih optimal dalam mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerah,” kata Teras Narang dalam *Focus Group Discussion (FGD)* di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Sebagai narasumber internal dalam FGD tersebut, Teras Narang menyoroti hasil Sidang Paripurna DPD RI pada 14 Januari 2025 yang merekomendasikan agar forum tersebut tidak hanya memuat laporan seremonial. Menurutnya, sidang paripurna harus menjadi ruang perjuangan konkret bagi kepentingan daerah.

Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah



Anggota Agustin Teras Narang dalam *focus group discussion (FGD)* di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. (Foto Istimewa)

“**Menata ulang aspek seremonial agar lebih esensial adalah salah satu agenda kami di DPD RI saat ini. Kami ingin lembaga ini lebih optimal dalam mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerah.**”

**Anggota DPD RI,
Agustin Teras Narang**

mengompilasi laporan penyerapan aspirasi dari berbagai provinsi menjadi isu bersama yang lebih besar. Hal ini dinilai penting karena permasalahan di satu daerah umumnya memiliki kesamaan dengan daerah lain. Dengan pendekatan ini, agenda kerja DPD RI bisa lebih fokus, sistematis, dan memiliki dampak nyata ke-

tika diperjuangkan bersama mitra kerja di kementerian atau lembaga terkait.

Bahkan, Teras Narang menyarankan agar para mitra DPD RI dari kementerian dan lembaga diundang dalam Sidang Paripurna DPD RI sebelum pembahasan di tingkat rapat kerja. Dengan demikian, mereka dapat lebih awal memahami isu-isu krusial yang perlu diselesaikan bersama guna menghasilkan solusi yang efektif bagi masyarakat.

“Sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, DPD RI memiliki tantangan dan peluang dalam konstitusi. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk mendukung penguatan peran DPD RI agar semakin berdaya guna dalam mendorong pembangunan nasional yang adil dan merata bersama DPR RI dan pemerintah,” kata senator dari Kalimantan Tengah itu. (*)

Pupuk Ilegal Beredar di Petani Senator: Aparat Harus Bertindak

M. Fathoni

Penulis

Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yulianus Henock, merasa geram dengan merebaknya peredaran pupuk palsu di kalangan petani. Pupuk palsu yang dimaksud adalah pupuk yang kandungannya tidak sesuai standar. Misalnya, pupuk NPK seharusnya mengandung tiga unsur hara makro, yaitu nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), tetapi ketiga unsur tersebut justru tidak ada.

“Sebagai anggota DPD RI yang membidangi urusan pertanian, saya menyesalkan praktik-praktik yang sangat merugikan petani seperti ini. Kami meminta agar Menteri Pertanian dan juga jajaran aparat penegak hukum bertindak tegas agar hal-hal seperti ini tidak terus berulang,” tegas Yulianus Henock, dikutip dari Tribun Kaltim, Minggu (2/2/2025).

Senator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini menegaskan bahwa aparat harus bertindak tegas dengan memasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*) semua pihak yang terlibat dalam produksi pupuk palsu, baik dari kalangan kuasa pengguna anggaran negara mau-



Anggota DPD RI Yulianus Henock. (Foto Istimewa)

pun produsen pupuk palsu itu sendiri. Selain itu, ia mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor.

Yulianus Henock juga menekankan agar produsen pupuk di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meningkatkan produksi pupuk nasional serta menjamin kualitasnya. Hal ini penting demi terpenuhinya kebutuhan swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.

Kasus peredaran pupuk palsu ini sebelumnya diungkap langsung oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Ia menyebut bahwa praktik ilegal tersebut dilakukan oleh 23 perusahaan dan

berpotensi merugikan petani hingga Rp3,2 triliun. Pupuk palsu yang beredar diketahui memiliki kandungan NPK hanya 0 persen, jauh di bawah standar minimal 15 persen yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian.

“Proses hukum harus ditegakkan sampai tuntas terhadap perusahaan-perusahaan nakal tersebut. Selanjutnya, mereka harus dimasukkan dalam daftar hitam agar tidak ada lagi celah untuk merugikan petani. Para petani kita adalah pejuang ketahanan pangan yang sangat berjasa dalam menjaga stabilitas ekonomi negeri ini. Jangan sampai mereka terus-menerus menjadi korban permainan para penjahat demi kepentingan pribadi,” tegas Yulianus Henock, yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI. (*)

Investasi Penggerak Utama Kemajuan Ekonomi Daerah

Betria Eriani

Penulis

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah untuk menarik minat investor, seperti komoditas unggulan di sektor pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan. Meski memiliki berbagai potensi tersebut, NTB belum mampu secara optimal menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

“Kita memiliki komoditas unggulan seperti hasil pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata, dan tambang. Namun, jika syarat-syarat pendukung investasi tidak dipersiapkan dengan matang, investor akan lebih memilih daerah lain seperti Bali yang dianggap lebih prospektif dan memberikan keuntungan lebih besar,” kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) Evi Apita Maya, Sabtu (1/2/2025).

Ditekankan, investasi merupakan salah satu penggerak utama dalam kemajuan ekonomi daerah. Dengan adanya investasi, roda

perekonomian daerah akan berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Karena itu, dia mendorong Pemerintah Provinsi NTB memperkuat berbagai instrumen dalam meningkatkan nilai investasi. “Investasi memang kunci kemajuan NTB, namun implementasinya tentu tidak mudah,” jelasnya.

Evi menyebutkan masih banyak kendala yang menghambat minat investor, di antaranya adalah belum optimalnya beberapa instrumen yang diperlukan untuk menarik investasi. Ada lima aspek utama yang perlu diperbaiki, yakni regulasi yang memadai untuk memberikan kepastian usaha, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang terhubung

dengan baik, jaminan stabilitas keamanan daerah, serta inovasi dan kemudahan dalam akses usaha.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, hingga triwulan III 2024, NTB berhasil mencatatkan investasi sebesar Rp36,9 triliun, atau 137 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan data investasi secara keseluruhan pada tahun 2024, DPMPTSP NTB masih menunggu angka resmi dari Kementerian Investasi.

Dalam tiga tahun terakhir, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), khususnya pertambangan, menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi investasi di NTB. Namun, Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong agar investasi di sektor non-tambang juga terus berkembang. “Sejak 2024, Pemprov NTB mulai fokus pada investasi di sektor non-tambang, seperti sektor UMKM. Meskipun angkanya kecil, sektor non-tambang seperti UMKM memberi dampak langsung pada masyarakat,” kata Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, Wahyu Hidayat, dikutip dari Suara NTB, Selasa (14/1/2025). (*)



Anggota DPD RI Evi Apita Maya.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

HGB di Laut Juga Ada di Jatim



Anggota DPD RI Lia Istifhama (kanan) menerima audiensi Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3). (Foto/dok pribadi)

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Sertifikat hak guna bangunan (HGB) di atas laut tidak hanya terjadi di Tangerang, Banten, tetapi juga di Jawa Timur, termasuk di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, serta di wilayah pesisir Surabaya yang terkait dengan proyek Surabaya Waterfront Land (SWL). Ini diungkapkan oleh Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) saat beraudiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama, di Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Timur pada Jumat (24/1/2025).

FM3 mengeluhkan dampak sosial ekonomi dari perencanaan SWL yang berujung pada reklamasi wilayah pesisir di Kenjeran, Surabaya. “Reklamasi untuk

membentuk enam pulau kecil di sekitar pesisir Surabaya memiliki dampak besar pada hasil laut nelayan setempat karena berlokasi di area konservasi dan pusat pencarian ikan. Proyek SWL ini berpotensi menyebabkan 800 nelayan tidak bisa mencari ikan lagi, dampaknya juga meluas pada ribuan pelaku UMKM,” ujar Ali Yusa dari FM3.

Potensi kehilangan mata pencaharian disebabkan akses mencari ikan yang tertutup oleh area SWL. Nelayan harus berputar jauh untuk mencari ikan karena luas mega proyek reklamasi yang rencananya akan dibangun oleh PT Granting Jaya ini adalah 1.084 hektare. “Proyek ini merugikan banyak pihak. Sebab itu wajar jika warga sekitar menolak saat pihak SWL melakukan sosialisasi proyek sebagai syarat mereka untuk men-

dapatkan izin Amdal,” kata Senator Lia.

Ning Lia, begitu senator ini akrab disapa, menyampaikan dukungannya kepada FM3, mengingat latar belakangnya sebagai aktivis. “Saya juga seorang aktivis, pasti memberikan dukungan kepada ikhtiar masyarakat untuk memperjuangkan apa yang jadi hak mereka. Terlebih ini terkait dengan dampak sosial ekonomi dan faktor ekologi,” kata Ning Lia.

Lebih lanjut, Ning Lia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan sumber protein untuk mencegah defisit akibat penurunan drastis hasil tangkapan ikan nelayan, yang sangat penting untuk mengantisipasi stunting. “Fungsi ekologi memang harus dijaga demi kelangsungan alam negeri ini,” tambahnya. (*)

Pancasila Bawa Misi Perdamaian

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menekankan bahwa Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Namun, Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara dan bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam Pancasila.

“Sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki pandangan hidup dan ideologi negara yang khas, yaitu Pancasila. Sebuah konsensus kebangsaan yang berisikan prinsip-prinsip ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial,” kata Sultan pada Perayaan Hari Persaudaraan Kemanusiaan Dunia dan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Dunia, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Sultan mengatakan ajaran dan nilai-nilai Pancasila mengandung misi universal dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran kolektif umat manusia.

Pancasila membawa misi perdamaian dan kemakmuran universal, di mana toleransi dan gotong royong menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa. Tanpa toleransi dan kolaborasi, nilai-nilai Pancasila akan kehilangan maknanya.



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan sambutan pada Perayaan Hari Persaudaraan Kemanusiaan Dunia dan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Dunia. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki pandangan hidup dan ideologi negara yang khas, yaitu Pancasila. Sebuah konsensus kebangsaan yang berisikan prinsip-prinsip ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial.”

**Ketua DPD RI,
Sultan B Najamudin**

Senator dari Provinsi Bengkulu itu menyebutkan bahwa para pemimpin agama memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah tantangan global seperti konflik geopolitik, bencana alam, dan perubahan iklim.

“Para tokoh agama merupakan teladan dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan dan menjaga keseimbangan lingkungan,” kata Sultan.

Dalam suasana geopolitik dunia yang masih mengandalkan kekuatan persenjataan dan eksploitasi ekonomi yang berujung pada pertumpahan darah, dibutuhkan pegangan moral yang lebih moderat. “Perdamaian, keadilan, dan kemakmuran hanya dapat terwujud jika setiap negara mampu mengedepankan sikap toleran dan berkolaborasi,” kata Sultan.

Pada kesempatan tersebut, peserta juga mendengarkan pesan perdamaian dari Paus Fransiskus dan Grand Syaikh Al-Azhar Al-Sharif melalui tayangan video. Selain itu, para pemuka agama dari berbagai majelis di Indonesia juga menyampaikan doa bersama untuk dunia yang lebih damai. (*)



DPD RI Sambut Baik Usulan Kerja Sama dengan Ombudsman



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin ketika menerima Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Arso Pranoto Nugroho

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik adanya usulan kerja sama antara lembaga yang dipimpinnya dengan Ombudsman RI. Tujuan kerja sama ini untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kerja sama ini sangat penting untuk menjaring aspirasi dan meningkatkan kolaborasi antara DPD RI dengan Ombudsman RI. Kami juga berharap kerja sama nanti bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Sultan saat menerima delegasi dari Ombudsman, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parle-

men Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Sultan menjelaskan, DPD RI dan Ombudsman RI akan bekerja sama untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelayanan publik serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dibutuhkan. Melalui kolaborasi ini juga diharapkan bisa tercipta sistem pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Apalagi DPD RI mempunyai kantor perwakilan di setiap provinsi, sehingga laporan masyarakat bisa cepat ditindaklanjuti.

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung juga menyambut baik adanya usulan kerja sama antara kedua lembaga tersebut. Langkah tersebut merupakan semangat baru bagi DPD RI sehingga bisa cepat menyelesaikan per-

masalah di daerah. Sebab, DPD RI menerima banyak sekali pengaduan di daerah. “Maka kami sangat mendukung kerja sama ini sehingga kita bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Hal serupa disampaikan anggota DPD RI asal Provinsi Bangka Belitung, Bahar Buasan. Dia mengaku banyak menerima laporan masyarakat ketika sedang reses di daerah pemilihan. Dengan kerja sama ini, ia menaruh harapan agar permasalahan di daerah bisa cepat diselesaikan. Kerja sama ini tentu akan memudahkan pertukaran informasi sehingga permasalahan di daerah bisa segera ditangani.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, Ombudsman RI dan DPD RI mempunyai semangat yang sama dalam menjembatani atau menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia optimistis bahwa kerja sama antara Ombudsman RI dengan DPD RI bisa mempercepat penanganan laporan masyarakat. “Jadi perlu ada sinergitas antara Ombudsman dengan DPD RI. Kalau kita saling mendukung, maka penyampaian laporan masyarakat semakin cepat, dan kualitas pelayanan publik bisa terkontrol. Jadi ini merupakan mitra strategis,” kata Najih. (*)

Presiden Perlu Evaluasi PSN Rempang Eco City

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako mendorong Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Menurut dia, saat ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi Rempang Eco City karena Prabowo sudah menyatakan akan mengevaluasi seluruh PSN.

Menurut Angelius, PSN Rempang Eco City layak dievaluasi karena banyak bermasalah dan ditolak masyarakat adat. “Kalau Rempang itu dalam penemuan kemudian tidak bermanfaat dan lain-lain, itu wajib dievaluasi. Ini kebijakan-kebijakan periode sebelumnya, Presiden Jokowi,” kata Angelius usai berkunjung ke kantor Pemerintah Kota Batam, Senin (3/2/2025).

Proyek Rempang Eco City merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dicitakan dan berjalan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proyek ini mendapat sorotan nasional karena menggusur masyarakat adat dan mengancam kelestarian lingkungan. DPD RI mendorong evaluasi setiap PSN peninggalan Jokowi yang bermasalah, termasuk PSN Rempang Eco City.



Ratusan warga Rempang saat unjuk rasa di Kampung Sembulang Hulu, Pulau Rempang, Rabu, 4 Desember 2024. (Foto Tempo)

“**Kalau Rempang itu dalam penemuan kemudian tidak bermanfaat dan lain-lain, itu wajib dievaluasi. Ini kebijakan-kebijakan periode sebelumnya, Presiden Jokowi.**”

**Wakil Ketua Komite II
DPD RI,
Angelius Wake Kako**

Konflik PSN Rempang Eco City terus saja terjadi. Peristiwa terbaru adalah tiga orang warga Rempang, termasuk lanjut usia (lansia), ditetapkan polisi sebagai tersangka. Ketiga warga disangkakan melanggar Pasal 133 KUHP soal perampasan kemerdekaan.

Penetapan tersangka itu buntut dari penyerangan yang

dilakukan petugas PT Makmur Elok Graha (MEG), pengembang PSN Rempang, ke beberapa posko perjuangan warga. Penyerangan dipicu oleh penangkapan satu orang petugas oleh warga karena kedatangan merusak spanduk penolakan relokasi dan penggusuran PSN Rempang Eco City.

Sedangkan tiga warga Rempang yang dijadikan tersangka tersebut dianggap menahan petugas perusahaan dan merampas kemerdekaannya. Namun, salah seorang dari tersangka membantah, ia hanya mempertahankan haknya sebagai warga yang menolak PSN Rempang Eco City. Sementara itu, Polresta Barelang menegaskan bahwa penanganan kasus penyerangan terhadap warga tersebut sudah sesuai prosedur. Berbagai kecaman juga datang, mendesak polisi mencabut status tersangka ketiga warga Rempang. (*)

Senator dari Kepri Suarakan Tak Perlu PSN di Rempang

Didin Saputra

Penulis

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib yang dialami warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang terus saja ditangkap sejak pulau itu ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) yang dikelola pihak swasta.

Ungkapan keprihatinannya itu disampaikan Ismeth dalam rapat kerja Komite I DPD RI bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). “Terakhir, ibu-ibu berusia 60 tahun ditangkap gara-gara PSN itu. Kalau bisa, dalam sidang kabinet, Pak Nusron bilanglah nggak perlu PSN di situ,” kata Ismeth.

Mantan Gubernur Kepulauan Riau itu mengungkapkan bahwa sebenarnya masyarakat Pulau Rempang tidak menolak adanya investor yang akan membangun Eco City dan industri,



Anggota DPD RI Ismeth Abdullah. (Foto Tangkap Layar)

asalkan mereka tidak diusir dari pulau yang selama ini menjadi tempat mereka bermukim. Inilah yang menyebabkan persoalan berlarut-larut sampai sekarang. “Banyak yang ditangkap,” ungkap Ismeth.

Saat ini, kata Ismeth, hanya tersisa 350 hektare atau dua persen tanah milik warga di Pulau Rempang dari total sebelumnya sebesar 17.500 hektare. Padahal warga di sana tidak menolak pembangunan. Mereka hanya ingin hak atas tanah miliknya dipertahankan. Namun, permintaan investor itu adalah agar tidak ada satu jiwa pun yang tinggal di situ.

Ismeth juga menyinggung sejumlah infrastruktur di Pulau Rempang yang telah dibangun oleh pemerintah dan akan beralih kepemi-

likan kepada pihak investor. “Padahal selama ini pemerintah, dari zaman sebelum Pak Habibie, sudah membangun jalan-jalan di Pulau Rempang, membangun sekolah, membangun puskesmas, membangun bendungan. Mau ke mana itu semua? Apa diserahkan begitu saja ke investor?” tanya Ismeth.

Proyek Rempang Eco City merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dicituskan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada tahun 2023, pemerintah mengeluarkan surat keputusan yang mengizinkan pengambilalihan tanah di Pulau Rempang untuk PSN. Proyek ini mendapat sorotan nasional karena menggusur masyarakat adat dan mengancam kelestarian lingkungan. (*)

Abdul Kholik Dukung Pembangunan Tanggul Laut

Theresia Oktavina

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah (Jateng), Abdul Kholik, mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun tanggul laut sepanjang 700 km di Pulau Jawa. Tanggul laut itu akan dibangun mulai dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur.

“Pembangunan tanggul laut ini menjadi upaya mengatasi banjir dan rob di wilayah pesisir yang mengancam pertanian. Upaya ini juga harus dibarengi dengan langkah pencegahan, misalnya dengan mengurangi penggunaan air tanah di kawasan kritis serta mengurangi beban angkutan darat yang berlebihan di Pantura,” kata Kholik, Minggu (2/2/2025).

Jika angkutan logistik terus dibebankan pada jalan darat di pantai utara (Pantura) Jawa, maka hal ini akan berdampak pada penurunan muka tanah. Selain itu, beban berlebih di jalan Pantura menyebabkan anggaran pemeliharaan jalan menjadi lebih besar. Salah satu opsi solusi adalah pembangunan tanggul, optimalisasi pengurangan penggunaan air tanah, serta pengalihan sebagian arus lo-



Tanggul laut di Muara Baru, Jakarta Utara. (Foto Kompas)

gistik dari jalan darat ke jalur laut atau kereta api.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus berkomitmen menyediakan air bersih untuk kebutuhan masyarakat dan industri. Dalam hal ini, infrastruktur dan investasinya harus disiapkan lebih dulu.

“Tentu harus disiapkan infrastrukturnya, dan investasinya harus diarahkan ke sana. Jika kita ingin menekan penggunaan air bawah tanah, maka ketersediaan air baku juga harus dipastikan,” ujarnya.

Rencana pembangunan tanggul di sepanjang pantai selatan Jawa itu diungkapkan oleh Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara bertajuk ESG Sustainable Forum 2025 di Jakarta,

Jumat (31/1/2025).

“Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” ucap Hashim.

Hashim menjelaskan bahwa tanggul laut raksasa tersebut sebenarnya sudah mulai dirancang sejak tahun 1994 pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, pemerintah sudah melihat ancaman kenaikan permukaan laut, tetapi proyek tersebut belum terealisasi hingga saat ini. Hashim memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa ini akan memakan waktu yang cukup lama, yakni 10–20 tahun. (*)



Bahas Pengaduan Masyarakat BAP Panggil Kementerian ESDM

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan memanggil perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas sejumlah pengaduan masyarakat di daerah dan sekaligus untuk bersinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Anggota BAP DPD RI Leni Haryati John Latief mengutarakan, instansinya memang senantiasa bersinergi dengan Kementerian ESDM dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan sengketa pertambangan dan perkebunan serta persoalan kesejahteraan karyawan perusahaan-perusahaan di bawah kementerian tersebut.

BAP DPD RI telah menerima sejumlah aduan dari masyarakat di daerah, terutama di daerah pemilihan masing-masing. Aduan ini akan kita tindaklanjuti dengan mengundang pejabat terkait di Kementerian ESDM. Kita ingin menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang berhubungan dengan pertambangan dan perkebunan serta persoalan kesejahteraan karyawan



Anggota DPD RI Leni Haryati John Latief (Foto Bengkulutoday)

perusahaan-perusahaan di bawah kementerian tersebut,” Anggota BAP DPD RI Leni Haryati John Latief, Kamis (23/1/2025).

Dia mencontohkan daerah pemilihnya Bengkulu sebagai provinsi yang memiliki sumber daya mineral cukup besar dan beragam, memiliki berbagai persoalan, baik dalam hal eksplorasi maupun yang berkaitan dengan masyarakat. Terutama operasi tambang yang bersinggungan dengan masyarakat.

Salah satu permasalahan di daerah adalah menyangkut kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Apakah kuota BBM tersebut sudah memenuhi kebutuhan di salah satu daerah. Dia mencontohkan di Bengkulu

yang terdiri dari sembilan kabupaten dan satu kota. Kalau kuota BBM tersebut sudah sesuai kebutuhan masyarakat tentu antrean mengular yang sering terlihat di SPBU-SPBU tidak ada lagi,” Leni Haryati.

Permasalahan lain diungkapkan Leni adalah sulitnya masyarakat untuk mengurus dan mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR) yang tidak memiliki dampak besar bagi lingkungan. Menurut dia, pemerintah harus memudahkan masyarakat yang ingin mengurus IPR. Karena IPR ini umumnya tidak berdampak besar bagi lingkungan. Tidak seperti industri besar yang bila tidak hati-hati akan memberikan dampak buruk untuk lingkungan. (*)

RUU Perkotaan Diharapkan Selesaikan Masalah Perkotaan

Betria Eriani

Penulis

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kini tengah mengumpulkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk bahan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkotaan. RUU Perkotaan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di perkotaan.

Dalam menyerap aspirasi di daerah pemilihannya, Bengkulu, anggota Komite I DPD RI Leni Haryati John Latief mengharapkan RUU tentang Perkotaan ini dapat merefleksikan kemajuan peradaban nusantara dan manusia di seluruh tanah air. “Mudah-mudahan RUU ini bisa menyelesaikan permasalahan, kemiskinan, sampah dan banjir yang selama ini kerap membuat masyarakat resah,” kata Leni Haryati, Selasa (21/1/2025).

Dijelaskan, wilayah perkotaan hendaknya bukan hanya menjadi pusat administrasi pemerintahan, namun juga dapat membahagiakan seluruh anggota masyarakatnya dengan pemenuhan hak dasar kelompok rentan seperti fakir miskin dan anak telan-



Anggota DPD RI Leni Haryati John Latief (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

tar, para lansia, penyandang disabilitas, nelayan tradisional dan lain sebagainya. Pembangunan di perkotaan boleh pesat, tapi tetap harus dengan melindungi pasar tradisional. Begitu juga pengembangan kawasan perumahan jangan sampai menghilangkan lahan pertanian,” ujarnya.

Senator dari Provinsi Bengkulu itu menekankan bahwa kota yang baik adalah kota yang dapat mengakomodir, bukan hanya kebutuhan jasmani warganya namun juga kebutuhan rohani. Bukan cuma ada sekolah yang bagus, rumah sakit yang keren, infrastruktur olahraga yang lengkap, tapi juga harus ada rumah-rumah ibadah yang nyaman, ruang pertunjukan seni yang cantik. Karena

bukan cuma tubuh yang butuh gizi, rohani pun butuh asupan.

Dia menyebut salah satu tantangan yang dihadapi perkotaan saat ini adalah bagaimana pembangunan wilayah perkotaan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, tapi tetap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berkelanjutan.

“Ada beberapa daerah yang telah berhasil menata kota mereka dengan sangat baik melalui keterlibatan masyarakat yang kuat dan transparansi dalam setiap tahap pembangunan. Hal-hal ini akan kita pelajari sebagai bahan untuk menyusun RUU tentang Perkotaan ini,” kata Leni Haryati John Latief. (*)



Susun DIM RUU Perkotaan Komite I Cari Masukan ke Sulsel



Rombongan Komite I DPD RI saat kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin (3/2/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai permasalahan perkotaan yang dapat dijadikan muatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkotaan.

Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, dalam pertemuan dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, menjelaskan latar belakang penyusunan RUU Perkotaan. Menurutnya, dinamika perkotaan di Indonesia berkembang pesat, dipengaruhi oleh faktor sejarah, ekonomi, dan sosial. Kota-kota di Indonesia terus berevolusi, dari kawasan tradisional menjadi pusat ekonomi

modern yang menghadapi tantangan globalisasi, perubahan iklim, serta urbanisasi yang pesat.

“Indikator lainnya seperti kemiskinan perkotaan dan ketimpangan sosial, khususnya di kota-kota besar, semakin nyata. Tantangan lain adalah keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas menjadi masalah utama di kota-kota besar. Keadaan ini diperburuk oleh sistem transportasi umum yang belum memadai,” ujar Andi Sofyan.

Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Jufri Rahman, menyoroti pentingnya perencanaan dan pengawasan pembangunan perkotaan. Ia menilai bahwa keberadaan UU atau regulasi yang komprehensif sangat diperlukan sebagai dasar dalam penye-

lenggaraan pemerintahan dan pembangunan perkotaan. “Selama ini, salah satu persoalan utama adalah tumpang tindih kewenangan antara berbagai level pemerintahan,” katanya.

Perwakilan Pemerintah Kota Makassar juga menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi, seperti banjir dan infrastruktur yang belum optimal. Selain itu, mereka menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah kota yang sering kali terhambat oleh birokrasi. Oleh karena itu, mereka berharap agar RUU Perkotaan dapat memberikan kewenangan yang lebih jelas bagi pemerintah kota.

Guru besar dari Universitas Muslim Indonesia, Hatta Fatta, menekankan bahwa selain daftar inventarisasi masalah, kajian mendalam dari berbagai disiplin ilmu sangat dibutuhkan. Ia menyoroti pentingnya memperjelas berbagai aspek dalam RUU Perkotaan, seperti diferensiasi antara kota dan perkotaan, posisi RUU ini di antara regulasi lain terkait tata ruang dan pengelolaan perkotaan, konsep smart city, serta aspek kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. (*)

Komite IV dan BPKP Sepakat Perketat Awasi Keuangan Negara

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasan keuangan negara, dengan fokus pada transparansi, efektivitas belanja daerah, dan mitigasi risiko korupsi, termasuk dalam pengelolaan dana desa.

“Pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dengan sinergi yang kuat antara DPD RI dan BPKP, diharapkan pengelolaan keuangan negara semakin transparan, efisien, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, saat rapat kerja Komite IV dengan BPKP, Selasa (4/2/2025).

Dalam rapat kerja tersebut, Komite IV menyoroti peningkatan belanja operasional desa yang mencapai 129 persen dalam lima tahun terakhir, yang mengurangi porsi belanja untuk pembangunan. Oleh karena itu, BPKP didorong untuk memperkuat pengawasan efektivitas penggunaan dana desa, termasuk optimalisasi implementasi Sistem Informasi



Pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI bersama Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, usai menggelar raker. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite IV meminta BPKP memastikan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa serta validasi data penerima manfaat untuk program prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan program tersebut tepat sasaran.

**Ketua Komite IV
DPD RI,
Ahmad Nawardi**

Keuangan Desa (Siskeudes).

Kemudian, Komite IV juga mendorong BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan dan tata kelola BUMD. Hal ini untuk memastikan adanya rencana bisnis yang matang, peningkatan tata

kelola perusahaan (GCG), serta peran pengawasan pemerintah daerah sebagai pemegang saham. Pasalnya, lebih dari 30 persen BUMD mengalami kerugian, 134 BUMD tidak aktif, dan 41,41 persen BUMD dinilai tidak efisien.

Komite IV DPD RI mendukung prioritas pengawasan BPKP tahun 2025 yang mencakup tujuh sektor utama, yaitu pembangunan SDM berkualitas, pembangunan infrastruktur, akuntabilitas keuangan pemerintah, transformasi ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Komite IV meminta BPKP memastikan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa serta validasi data penerima manfaat untuk program prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan program tersebut tepat sasaran,” ujar Ahmad Nawardi. (*)

Perlu Integrasi Perlindungan Korban Laka Lalin dalam SJSN

Didin Saputra

Penulis

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Jasa Raharja dalam rangka menginventarisasi materi penyusunan RUU Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam RDP tersebut, Komite III DPD RI menyoroti pentingnya perlindungan sosial yang lebih inklusif bagi korban kecelakaan lalu lintas (laka lalin) dalam sistem jaminan sosial nasional.

“Dengan adanya pembahasan perubahan UU SJSN, Komite III DPD RI menilai perlu adanya integrasi perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas ke dalam sistem jaminan sosial nasional agar lebih komprehensif dan tidak tumpang tindih,” kata Ketua Komite III DPD RI Filep Mawafma, Selasa (4/2/2025).

Merujuk pada UU SJSN, sistem jaminan sosial nasional meliputi lima jenis jaminan, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kesemuanya dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, dalam implementasinya, per-



Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI bersama Direksi PT Jasa Raharja usai menggelar RDP. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

indungan bagi korban laka lalin dan angkutan jalan selama ini hanya ditangani dari sisi kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Sementara itu, santunan atau pertanggungjawaban korban kecelakaan belum menjadi bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Jelita Donal menilai penanganan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan harus dapat dilakukan segera. Apalagi terdapat dua perusahaan yang memberikan jaminan terkait kecelakaan dan penanganan di rumah sakit, yaitu Jasa Raharja dan BPJS. “Setiap warga yang mengalami kecelakaan, negara harus hadir secepatnya. Jangan sampai terjadi ketidakharmonisan antara BPJS dan Jasa Raharja, yang akhirnya merugikan masyarakat,” ucapnya.

Senator dari Riau, Sewitri, dan senator dari Bali, Ida

Bagus Rai Dharmawijaya, berharap agar penanganan korban kecelakaan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan melalui satu pintu antara Jasa Raharja dengan BPJS. Jika bisa, sistem satu pintu ini akan lebih efektif, sehingga tidak menyulitkan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan dan membutuhkan pengobatan.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono menjelaskan bahwa PT Jasa Raharja telah mengelola dana pertanggungjawaban kecelakaan berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964, sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Ia pun setuju bahwa perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari jaminan sosial yang harus terus diperkuat. (*)

Hilirisasi Minerba Harus Libatkan Masyarakat Lokal



Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Adi Nugroho

Penulis

Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) harus mencakup kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan dan teknologi rendah karbon. RUU ini juga harus mencakup upaya peningkatan nilai tambah sumber daya alam (SDA) bagi masyarakat Indonesia sekaligus memperhatikan isu lingkungan, termasuk transisi energi menuju Net-Zero Emission (NZE).

“Insentif untuk mendukung penggunaan energi terbarukan dalam sektor hilirisasi serta penguatan tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan hingga evaluasi usaha tam-

bang sangat penting untuk memastikan manfaat pertambangan dirasakan secara adil,” kata anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mirah Midadan Fahmid dalam rapat Komite II DPD RI bersama narasumber terkait, Selasa (21/1/2025).

Mirah menyatakan bahwa hilirisasi dan industrialisasi adalah kunci bagi peningkatan ekonomi Indonesia, khususnya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi harus sejalan dengan komitmen lingkungan dan transisi energi bersih. Oleh karena itu, RUU ini harus mencakup integrasi Nationally Determined Contributions (NDC), *roadmap* pensiun dini PLTU, Just Energy Transition Partnership (JETP), dan *grand design* hilirisasi.

Mirah mengusulkan beberapa pendekatan untuk memastikan kebijakan hilirisasi dalam RUU ini mampu mendorong nilai tambah ekonomi sambil mengatasi dampak sosial dan lingkungan. Misalnya untuk komoditas nikel, integrasi teknologi high pressure acid leaching (HPAL) untuk mendukung produksi nikel baterai berkualitas tinggi yang diperlukan untuk energi bersih.

Dia juga menyoroti dominasi energi fosil dalam proses hilirisasi saat ini. Data menunjukkan bahwa banyak smelter di Indonesia masih bergantung pada PLTU batubara. Ini bertentangan dengan upaya global untuk mengurangi emisi karbon. Ketergantungan ini menjadi ancaman bagi rencana transisi energi, terutama dalam penggunaan dana kemitraan transisi energi.

“Meski penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara untuk smelter diizinkan demi peningkatan nilai tambah SDA, langkah ini kontradiktif dengan tujuan transisi energi. Jadi perlu pendekatan yang tidak hanya fokus pada pertambahan nilai ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Investasi dalam teknologi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan skala produksi nikel matte yang lebih bernilai tinggi,” jelas Mirah. (*)

Komite I Raker dengan Kejaksaan Bahas Penegakan Hukum di Daerah

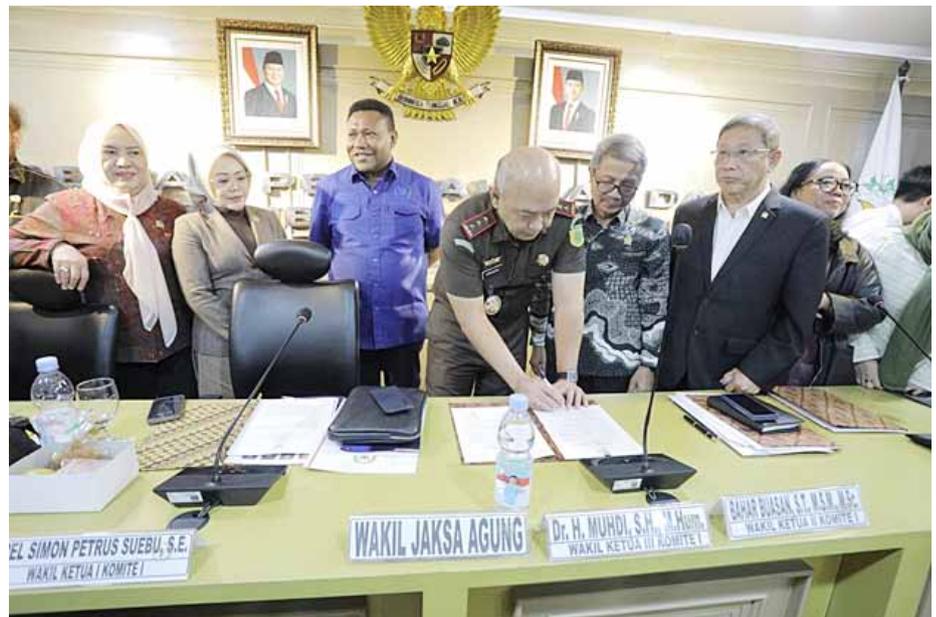
Nanda Russia Rola

Penulis

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai peran kejaksaan baik di tingkat nasional maupun di daerah sangat menentukan dalam mewujudkan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang bersih serta bebas korupsi. Sehingga, pembangunan dapat dirasakan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat daerah.

“DPD RI sangat berkepentingan untuk turut mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dengan tujuan agar pengelolaan anggaran dan program pembangunan dapat dirasakan optimal oleh masyarakat,” ucap Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, saat memimpin rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, Selasa (11/2/2025).

Komite I menyoroti pelaksanaan Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) dari Kejaksaan yang merupakan suatu program pencegahan penyimpangan dana desa melalui pendekatan pengawasan, pendampingan, dan pengawasan, baik aspek sistem kerja maupun SDM aparatur pemerintah desa dengan metode sosialisasi, koordinasi, kerja kolaborasi,



Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono menandatangani kesimpulan raker disaksikan pimpinan dan anggota Komite I DPD RI. Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

maupun aplikasi berbasis informasi dan teknologi (IT).

Muhdi juga mengapresiasi tingkat kepercayaan masyarakat pada kejaksaan yang sangat tinggi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Penegakan hukum dan keadilan merupakan elemen yang vital dan sangat dibutuhkan, termasuk penuntutan terhadap para pelanggar hukum. Karena itu, kejaksaan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dalam penegakan hukum, untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara.

Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono menjelaskan bahwa amanah dan arahan khusus Presiden RI kepada Kejaksaan Agung tertuang

dalam Asta Cita, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. “Dalam hal ini, kami bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lainnya untuk mewujudkan Asta Cita ini,” jelas Feri Wibisono.

Dia juga menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Komite I DPD RI yang terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap kinerja kejaksaan dengan memberikan saran dan masukan yang konstruktif, yang diharapkan dapat mendorong kejaksaan untuk terus bergerak maju ke arah perkembangan yang lebih baik lagi. (*)

Adlan Nawawi Jadi Ketua Umum FOKUS DPD RI 2024-2029

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Dr. Adlan Nawawi, M.Hum resmi terpilih sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Staf Anggota DPD RI (FOKUS DPD RI) untuk periode 2024-2029. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun ke depan. Adlan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak, kesejahteraan, serta peningkatan kapasitas para staf anggota DPD RI yang selama ini berperan sebagai pilar penting dalam mendukung tugas konstitusional para senator.

Sebagai Ketua Umum FOKUS DPD RI, Adlan Nawawi menekankan pentingnya peran staf dalam membantu penyusunan kebijakan, riset, advokasi, serta komunikasi antara anggota DPD RI dan masyarakat. Oleh karena itu, ia berjanji akan memperjuangkan pengakuan yang lebih besar terhadap kontribusi para staf, termasuk peningkatan kesejahteraan serta akses yang lebih luas terhadap pelatihan dan pengembangan profesional. Ia berharap dengan adanya peningkatan kapasitas staf, efektivitas kinerja DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah juga semakin optimal.

“Kita harus memastikan bahwa staf anggota DPD RI mendapatkan hak yang layak, baik dari segi kesejahteraan maupun kesempatan untuk berkembang secara profesional. Dengan meningkatkan kapasitas dan memperkuat solidaritas, kita bisa lebih optimal dalam mendukung tugas-tugas senator untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” ujar Adlan Nawawi.

Pemilihan Adlan Nawawi sebagai Ketua Umum FOKUS DPD RI membawa harapan baru bagi seluruh staf anggota DPD RI. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini bertekad memperjuangkan kebijakan yang



Plh. Sekjen DPD RI Lalu Niqman Zahir menyerahkan pataka FOKUS kepada ketua terpilih Adlan Nawawi. (Foto JPNN)

lebih berpihak kepada staf, termasuk kepastian status kepegawaian, peningkatan fasilitas kerja, serta akses terhadap pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, ia juga berkomitmen untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara staf anggota DPD RI dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Adlan Nawawi terpilih dalam forum Musyawarah Besar (Mubes) ke-III FOKUS DPD RI yang digelar pada Jumat-Sabtu (7-8/2/2025) di Villa Tania Cilember, Desa Jogjogan, Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemilihan ini dihadiri oleh 95 staf ahli dan administrasi anggota DPD RI dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Plh. Sekretaris Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir, turut hadir dan secara simbolis menyerahkan bendera pataka kepada Ketua Umum terpilih.

Plh. Sekretaris Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir, berharap kepemimpinan baru ini dapat membawa perubahan positif dalam meningkatkan kinerja para staf anggota DPD RI, terutama dalam bidang keahlian yang mendukung penyusunan regulasi yang berpihak pada masyarakat. “Dengan kepemimpinan baru ini, FOKUS DPD RI diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong kinerja para staf anggota DPD RI,” pungkasnya. (*)

BANJIR (LAGI) DI JAKARTA

Oleh:

Andika Prima Sari,

Analisis Legislatif Madya, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Latar Belakang

Kota Jakarta dan wilayah sekitarnya mengalami banjir menjelang perayaan Imlek 2576 Kongzili pada 28 Januari 2025. Selain pengaturan sistem drainase yang buruk, area resapan air yang berkurang, dan sumber pengendalian banjir yang terbatas, tingkat curah hujan yang ekstrem selama dua hari tersebut adalah salah satu penyebabnya.

Banjir di Jakarta dapat dianggap sebagai peristiwa tahunan yang konsisten. Tercatat beberapa banjir besar yang melanda Jakarta sejak zaman kolonial, seperti pada tahun 1621, 1654, 1873, 1909, dan 1918. Kejadian-kejadian tersebut hampir selalu disebabkan oleh luapan air dari Sungai Ciliwung. Banjir tersebut menyebabkan pemerintah Belanda membangun sistem polder dan kanal baru pada tahun 1920-an.

Selama Orde Baru, banjir sering terjadi di Jakarta. Pemerintah Belanda membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun Pola Induk Pengendalian Banjir Jakarta, yang dibuat pada tahun 1973. Namun,

karena pertumbuhan pesat wilayah Jakarta dan sekitarnya, pada akhirnya pola ini harus dikaji ulang.

Dampak dan Penanganan Banjir

Dampak sosial bencana banjir di Jakarta termasuk pengungsian orang ke tempat yang aman dari banjir dan gangguan aktivitas sehari-hari seperti sekolah dan bekerja. Dampak ekonomi lainnya

adalah kerugian material, seperti kerusakan rumah, kendaraan, dan infrastruktur, serta penurunan produktivitas bisnis dan sektor pariwisata. Dampak lingkungan berikutnya adalah pencemaran air, penyebaran penyakit, dan kerusakan ekosistem sungai dan pesisir.

Peraturan yang mengatur penanganan dan mitigasi bencana banjir di Jakarta dari tahun 2020 hingga 2025 yaitu Instruksi Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021, yang mengatur rencana kontingensi penanggulangan bencana banjir tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Menurut Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 oleh Kementerian PPN/Bappenas, ada 6 (enam) masalah strategis di wilayah Jawa-Bali yang memerlukan perhatian, khusus untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah masalah kerentanan bencana banjir rob





Banjir Jakarta (Foto Kompas.com)

yang terus meningkat di wilayah pesisir utara pulau Jawa.

Salah satu inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RKPD Tahun 2025 terkait penanganan banjir adalah Proyek 492, yang mencakup prinsip pengendalian banjir melalui pembangunan dan rehabilitasi 9 (sembilan) polder, 4 (empat) waduk, 2 (dua) kali revitalisasi, dan drainase vertikal. Proyek 942 menggabungkan konsep pengendalian banjir, konservasi air, konsep biru dan hijau, perbaikan ekologi, dan estetika kota. Daerah yang tidak dapat mengalirkan air secara gravitasi memiliki polder yang dibangun untuk menangani banjir. Untuk mengurangi debit puncak banjir pada sistem aliran kali, waduk/embung dibangun. Sementara itu, revitalisasi kali

difungsikan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus menata bantaran kali.

Selain proyek 942 tersebut, inovasi teknologi seperti aplikasi mobile Jakarta Satu dapat digunakan oleh warga untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan bencana, seperti peta informasi banjir, peta historis banjir, dan peta penurunan muka tanah. Dengan mengakses aplikasi mobile, warga dapat melakukan antisipasi dan meminimalkan bencana akibat banjir.

Kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan merupakan 4 (empat) isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada RKPD 2025 dan isu strategis utamanya adalah kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, yang berfokus

pada banjir salah satunya.

Terakhir, RKPD Provinsi Jakarta untuk tahun 2025 sudah ditetapkan dan dapat diimplementasikan. Untuk memastikan bahwa hasil dari penanganan banjir benar-benar dirasakan oleh warga, pemerintah daerah dapat melaksanakan rencana kerja yang telah dirancang dan dilaksanakan secara terukur dan sungguh-sungguh. Program penanganan banjir bukanlah upaya jangka panjang yang dilakukan setiap tahun tanpa hasil yang jelas. Investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, edukasi masyarakat, peningkatan koordinasi antar lembaga sangat penting untuk keberhasilan program penanganan banjir yang telah dirancang. DKI Jakarta tidak seharusnya menyambut banjir sebagai seremoni setiap tahun. (*)



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Selamat Memperingati

HARI GIZI NASIONAL



25 Februari 2025



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI

